**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang memiliki asas demokrasi dimana masyarakatnya memiliki hak yang sama dalam menentukan kebijakan dan memilih pemimpinnya, keikutsertaan masyarakat Indonesia tersebut merupakan sebuah partisipasi politik. Partisipasi politik ini dapat dilihat dari antusias masyarakat dalam merespon kebijakan pemerintah. Dalam merespon kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan dampak negatif dan dampak positif.

Partisipasi politik tidak hanya berupa aksi untuk menolak suatu kebijakan namun juga dapat berupa dukungan terhadap kebijakan tersebut, yang mana tujuan utamanya adalah untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Mahasiswa sebagai kaum intelektual muda yang memiliki tingkat berpikir yang tinggi dan bersifat dinamis, peran mereka merupakan salah satu kunci untuk menentukan tingkat antusias masyarakat dalam partisipasi politik.

Melihat partispasi politik merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih luas lagi dari partisipasi yang umum hingga khusus, maka kami membahas mengenai partisipasi polotik di Indonesia sampai yang ada di kalangan mahasiswa.

* 1. **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana partisipasi politik di Indonesia?
   1. **Tujuan**
2. Untuk mengetahui partisipasi politik di Indonesia
   1. **Manfaat**

Untuk memberikan pengembangan pengetahuan mengenai partisipasi politik di Indonesia dan kalangan mahasiswa.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Partisipasi Politik**

a. Pengertian

Menurut Herbert McClosky partisipasi politik adalah aktifitas sukarela dari anggota masyarakat. Dimana masyarakat mengikuti pembuatan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pembentukan kebijakan publik (Budiarjo, 2010:367). Istilah partisipasi politik yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* adalah kegiatan pribadi dari masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Partisipasi tersebut dapat berbentuk kegiatan individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Budiarjo, 2010:368)

b. Bentuk-bentuk

Terdapat berbagai macam wujud atau bentuk dari partisipasi politik. Namun untuk lebih mengkhusukannya lagi, bentuk dari partisipasi dibagi menjadi dua macam yaitu partisipasi politik secara konvensional dan non-konvensional. Partisipasi politik secara konvensional merupakan partisipasi yang lebih teratur, terjadwal dan tata cara pelaksanaannya sudah diketahui oleh masyarakat, contohnya saja pemilu. Sedangkan partisipasi non-konvensional lebih cenderung berbentuk aksi-aksi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, yang diwujudkan dengan cara demonstrasi bahkan aksi perusakan fasilitas umum. Menurut Mas’oed dan MacAndrews (2011) bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut

1. Pemberian Suara (*Voting*)

Sistem pemberian suara untuk menentukan pemimpin sebenarnya dapat diterapkan di berbagai negara, baik itu negara demokrasi maupun otoriter. Namun, pengambilan suara pada negara otoriter atau negara dengan partai tunggal tidak seperti di negara demokrasi yang memang bertujuan untuk mengubah kebijakan pemerintah, pada negara otoriter lebih untuk menunjukkan kekuasaan kaum elite dalam pemerintahan dan memobilitas masyarakat, serta untuk menunjukkan dukungan masyarakat terhadap pihak penguasa. Dan apabila ada masyarakat yang tidak mengikuti sistem tersebut dianggap sebagai bentuk protes.

1. Bentuk partisipasi konvensional lainnya

Bentuk partisipasi yang paling terlihat dan mudah diukur adalah pemungutan suara, namun partisipasi lainnya seperti diskusi politik, kampanye, bergabung dengan partai politik atau kelompok kepentingan, berkomunikasi dengan pejabat politik dan administratif juga dilakukan oleh sebagian masyarakat, walaupun intesitas dan partisipasinya tidak sebesar pemungutan suara.

1. Demonstrasi, Protes dan Tindak Kekerasan

Bentuk partisipasi politik yang berbentuk demonstrasi, protes, dan tindak kekerasan sebenarnya frekuensi pelaksanaanya tidak tetap, bergantung pada situasi dan kondisi. Tindakan- tindakan tersebut biasanya dilakukan untuk menolak kebijakan pemerintah setelah cara lain dianggap tidak efektif untuk menghasilkan perubahan.

c. Faktor yang mempengaruhi

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik munurut Mas’oed dan MacAndrews (2011) antara lain

1. Pendidikan tinggi

Pendidikan tinggi dapat mempengaruhi partisipasi politik karena dengan tingkat pendidikan yang tinggi, banyak masyarakat yang mengerti tentang politik sehingga cenderung berminat dan ingin terlibat langsung dalam partisipasi politik. Bisa dilihat dari kurikulum dalam dunia pendidikan yang telah memasukan ilmu tentang politik untuk dipelajari langsung oleh siswa atau mahasiswa.

1. Jenis kelamin

Jenis kelamin dapat mempengaruhi partisipasi politik karena bisa jadi lelaki lebih antusias dan aktif dibandingkan dengan perempuan dalam berpasrtisi politik.

1. Status sosial ekonomi

Semakin tinggi status sosial ekonomi maka semakin peduli terhadap keikutsertaan dalam partisipasi politik, karena masyarakat yang berpenghasilan rendah akan cenderung apatis dan memikirkan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya terlebih dahulu dibandingkan berpartisipasi politik.

1. Partai politik

Orang-orang yang berpartai politik lebih sering memberikan suara dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berpartisipasi, dan yang melakukan kegiatan kampanye adalah pengikut setia partai untuk mendapatkan suara, itulah yang menyebabkan partai politik dapat mempengaruhi partisipasi politik.

.

**BAB III**

**PEMBAHASAN**

**3.1 Partisipasi Politik di Indonesia**

Dalam negara yang berasaskan demokrasi, partisipasi politik sangatlah penting, karena partisipasi politik dapat mempengaruhi pengambilan sebuah kebijakan di dalam pemerintahan suatu negara tersebut. Berpartisipasi politik bisa berbentuk individual ataupun kelompok kerena kita mempunyai hak dalam berpartisipasi politik, bahkan dalam UUD 1945 pasal 28 berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan di undang-undang” dan di atur secara jelas dalam undang-undang nomor 12 tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan berpolitik, dimana poin-poin yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dalam berbagai hal masyarakat Indonesia sudah menunjukkan beberapa nilai demokrasi seperti menuntut pemerintahan.

Dalam negara-negara demokrasi umumnya di anggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik (Budiardjo, 2010:369). Sebagai negara yang berasaskan demokrasi partisipasi politik sangatlah penting karena semua itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan pastinya untuk rakyat.

Salah satu contoh dari partisipasi politik adalah pemilihan umum yang merupakan sebuah hak asasi manusia yang sangat mendasar. Sesuai dengan asas maka rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya harus dikembalikan kepada rakyat dan bahkan merupakan sebuah pelanggaran jika seumpama pemerintah tidak mengadakan sebuah pemilihan umum atau menundanya tanpa adanya sebuah persetujuan dari para wakil rakyat (Kusnardi, 1998). Dari pernyataan inipun seharusnya kita sudah bisa menilai bahwa seharusnya partisipasi politik bersifat jujur, adil, dengan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, tetapi kenyataannya sangat berbanding terbalik jika di dalam faktanya. Kita bisa melihat sikap dan rasa berpartisipasi politik di negara kita ini disaat menjelang ataupun sedang diadakannya sebuah pemilu, sungguh sangat ironis jika menanyakan tentang rasa berpartisipasi politik di negara ini, karena partisipasi politik masyarakat bisa disetir atau dikendalikan dengan uang, memang negara kita ini belum sembuh total dari penyakit yang sudah melilit negeri kita sejak lama yaitu *money politics*, dan juga memang sebagian besar masyarakat masih terfokus dengan mencari sebuah nafkah untuk keluarga dibandingkan untuk mengurusi tentang sebuah partisipasi dalam berpolitik. Kemungkinan besar memang ada dari beberapa oknum yang ingin memenangkan calonnya, dan dia menggunakan berbagai cara, baik dengan cara yang sehat maupun yang tidak sehat. Padahal dengan diadakannya sebuah pemilihan umum itu merupakan sebuah legitimasi dari negara kita di masa yang akan datang. Dan jika sebuah pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan prosedural dapat dimungkinkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan negara kita di masa yang akan datang.

Dari para pemerintahan sendiripun seakan bahkan tidak memberikan sebuah wadah kepada rakyatnya untuk melaksanakan sebuah kegiatan partisipasi politik secara bersih, jujur, dan aman, bahkan seharusnya ketika di adakannya sebuah sosialisasi ataupun kampanye seharusnya diberikan sebuah undang-undang untuk para calon agar tidak menggunakan *money politic* ataupun hal-hal yang berbau politik yang tidak sehat, dan ketika melakukan sebuah sosialisasi harus ada sebuah pihak yang selalu mengawasi jalannya sebuah kampanye hingga berakhir, dan jika di indikasikan bahwa ada salah satu calon menggunakan *money politic* atau hal yang lain yang berbau tidak sehat harus di tindak tegas dan langsung di hapus sebagai calon tetap.

Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi politik salah satunya adalah status sosial ekonomi (Mas’oed dan MacAndrews, 2011), melihat perekonomian rakyat Indonesia yang bisa dikatakan perekonomiannya menengah kebawah partisipasi politik yang seharusnya itu menjadi ajang penentu hidup Indonesia di masa yang akan datang, berubah menjadi sebuah partisipasi politik yang kotor dan tidak jujur, bahkan seakan Negara kita untuk dikatakan sebuah partisisipasi politik berubah menjadi sebuah mobilisasi politik dengan menggunakan politik uang yang memang itu semakin masif.

Adanya *money politic* dalam sebuah ajang pemlihan umum saat ini bukanlah hal yang baru lagi di kalangan padahal jika seorang calon pada waktu sebelum menjabat sebagai pemimpin sudah mengeluarkan modal yang begitu banyak dan melihat gaji dari para anggota pemerintahan yang tidak berbanding imbang dengan modal yang di keluarkan, sudah suatu hal yang sudah tidak bisa dielakkan lagi bahwa para calon itu akan berusaha sebisa mungkin mengembalikan modal awal yang telah mereka keluarkan di saat sebelum menjabat. Sekarang logikanya gaji pokok untuk DPR berkisar antara 4,2 juta per bulan (detiknews, 2013), dan bila ditambah uang tunjangan untuk pembuatan sebuah RUU dapat mencapai 50 juta, jika dikalikan dengan masa jabatan mereka selama lima tahun yang hanya berjumlah 3 miliyar, sedangkan menurut yang dikatakan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar yaitu Bambang Soesatyo modal dalam melakukan kampanye minimal 1 miliyar (liputan6.com, 2013) dan menurut wakil ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo bisa mencapai 6 miliyar rupiah (antaranews.com, 2103). Seperti yang dapat kita amati, selisih antara gaji dengan modal awal bisa mencapai setengah dari modal, secara tidak langsung mereka akan berusaha sebisa mungkin mengembalikan modal awal mereka dengan berbagai cara.

Lalu bagaimana nasib negeri kita ini jika setiap anggaran baik dari daerah ataupun nasional secara masif di selewengkan oleh para bapak pemimpin kita, dan bagaimana dari para rakyat yang semestinya menerima bantuan tetapi tidak semestinya, bagaimana nasib pendidikan di negeri kita jika uang untuk pendidikan telah masuk kedalam kantong masing-masing, dan bagaimana tingkat kesehatan jika uang telah habis untuk kesenangan mereka masing-masing, sedangkan masih banyak di pelosok negeri kita yang masih miris untuk masalah kesehatan baik mulai balita hingga manula. Yang perlu dipertanyakan kepada bapak negara kita sekarang adalah kesejahteraan yang bagaimana yang di maksudkan dan yang telah di janjikan untuk rakyat negeri kita tercinta ini? jawabannya hanyalah Tuhan dan mereka yang tau. Dilihat dari rendahnya partisipasi politik yang bersifat bersih peran mahasiswa disini sangat penting, karena partisipasi politik di dalam lingkup universitas bisa dikatakan sebagai gambaran Indonesia kecil, didalamnya juga memiliki struktur-struktur masyarakat dan kebijakan yang telah dibuat untuk memajukan kampus tersebut. Kesadaran dan peran langsung mahasiswa terhadap politik memengaruhi partisipasi politik di dalam universitas.

Seringkali terjadi perbedaan pendapat dari kebijakan yang telah dibuat dan kenyataan yang mahasiswa mau, sehingga membuat mahasiswa melakukan suatu aksi agar dapat merubah kebijakan tersebut. Mahasiswa seringkali menggunakan manajemen aksi dalam aksi itu sendiri , menggunakan akal dan hak berpendapat mereka untuk suatu kemajuan. Di dalam universitas mahasiswa dididik untuk berpolitik, mulai berpolitik untuk kepentingan kehidupan kampus itu sendiri maupun Indonesia.

Peran mahasiswa dalam partisipasi politik memiliki bentuk yang beragam antara lain dengan ikut serta dalam organisasi, pemilwa (pemilihan mahasiswa), dan aksi demonstrasi. Bentuk paling sederhana partisipasi politik yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam lingkup universitas yaitu memilih dalam pemilwa (pemilihan mahasiswa). Namun, secara lebih luas mahasiswa diharapkan sadar atas perannya mengawal dalam politik negara. Aksi mahasiswa adalah aksi yang diharapkan oleh masyarakat awam , dimana aksi mahasiswa sering didengar dan ditanggapi , mahasiswa dalam menjalankan aksinya lebih teratur dibandingkan masyarakat yang tidak mengerti bagaimana cara melakukan aksi.

Mahasiswa seharusnya peduli terhadap perkembangan politik, baik di dalam universitas maupun politik negara. Sebab di zaman demokrasi ini, sikap apatis mahasiswa terhadap politik hanya akan menyebabkan peluang adanya KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) dalam suatu pemerintahan. Tujuan mahasiswa dan masyarakat awam adalah sama, hanya saja cara mengeluarkan aspirasi yang berbeda, bagaimana jika mahasiswa tidak ikut serta dalam partisipasi politik? Pastinya akan ada kebijakan yang tidak memikirkan kepentingan bersama namun lebih memikirkan kepentingan golongan dan masyarakat akan lebih pro terhadap mahasiswa. Mahasiswa dan pemuda adalah agen penerus serta pelurus bangsa dimana masyarakat Indonesia akan menggantungkan harapan kepada para mahasiswa serta pemuda, jika mahasiswa saja tidak ikut berpartisipasi, negara ini akan mengalami krisis kepemimpinan.

Sebenarnya tindakan yang mencerminkan partisipasi politik dapat bersifat implisit, contohnya saja golput yang dapat dilihat sebagai partisipasi politik atau tidak tergantung dari penyebab melakukan golput tersebut. Pada dasarnya kita tahu bahwa golput adalah suatu tindakan yang tidak memihak, atau dalam kegiatan pemilu mereka tidak memilih salah satu calon, dan itu bisa kita masukan ke dalam kategori masyarakat yang tidak melakukan partisipasi politik. Kita lihat jauh kebelakang ketika kita mengambil studi kasus dari orde baru di Indonesia yang pemerintahannya sangat otoriter. Golput di Indonesia pertama kali terjadi dan menjadi populer ketika zaman orde baru. Hal ini disebabkan karena pemerintahan yang sangat otoriter dan sudah pasti ketika pemilihan, Partai Golkar yang mengusung Suharto pasti menang setiap pemilihan. Karena itu ada sekelompok aktifis mahasiswa yang menyebut dirinya golongan putih yang tidak ikut memilih. Gerakan golput pada masa itu dipelopori oleh Arif Budiman (suaramerdeka.com, 2003). Golput adalah bentuk perlawanan, sehingga reaksi penguasa terhadap golput cukup keras. Akibatnya, masyarakat takut terang-terangan menyatakan dirinya golput, bahkan terpaksa ikut memilih karena ditakut-takuti dan yang terang-terangan menyatakan dirinya golput harus siap menanggung akibatnya. Jadi sangat jelas jika golput pada era orde baru adalah suatu upaya penolakan sistem kepemerintaan yang tidak memuaskan masyarakat dengan cara tidak memilih. Hal ini akan sangat berbeda ketika kita memilih tapi hanya di bayangi rasa takut. Akhirnya, kita hanya dituntut untuk memilih karena adanya ancaman, bukan karena adanya rasa percaya atau rasa yakin atas calon yang kita pilih. Kita memilih tanpa tahu apa yang sebenarnya kita pilih, dan hal itu bukan partisipasi politik yang sebenarnya. Beda halnya dengan yang golput untuk melawan suatu sistem pemerintahan, dan itu bisa disebut partisipasi politik yang sesungguhnya.

Tetapi pada era reformasi golput malah banyak berubah dari yang seharusnya partisipasi politik menjadi bukan partisipasi politik. Menurut *website* ruangpublik.com kami menemukan bahwa fakta yang seperti dikatakan oleh ketua umum KPU Husni Kamil. Beliau mengungkapkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif pasca reformasi cenderung menurun. Dia menyontohkan di Pemilu 1999 sebesar 93,30 persen, Pemilu 2004 84,07 persen. Sedangkan di Pemilu 2009 sebesar 70,99 persen dan di Pemilu 2014 ditargetkan 75 persen. Mungkin hal ini di sebabkan bukan karena melawan atau menolak sistem yang ada pada masa reformasi. Karena pada reformasi orang tidak akan ditangkap dan diancam ketika dia memilih untuk golput berbeda dengan era orde baru. Jika dianalisis lagi kebanyakan golput ini di karenakan masyarakat yang apatis terhadap politik, kurang antusias untuk berpartisipasi politik, adapula yang beralasan tidak tau calon, tidak tau visi-misi, sampai kurangnya sosialisasi. Tetapi masalah golput ini bukan saja karena masyarakat yang tidak mau berpartisipasi politik atau apatis, golput juga di sebabkan, masyarakat yang mempunyai hak untuk memilih tidak terdaftar sehingga mereka tidak memiliki hak pilih. Namun pada era reformasi ada juga yang menggunakan golput untuk sarana berpartisipasi politik. Contohnya saja kita ambil dari kehidupan kampus. Ketika pada musim pemilu kita lihat banyak poster atau selogan-selogan yang terpasang di lingkungan kampus, banyak tim sukses bersosialisasi untuk mensukseskan calonnya, ada debat terbuka, ada debat tertutup. Dan kita rasa itu sosialisasi yang sangat luas untuk ukuran sebuah universitas. Tetapi mengapa masih ada yang tidak memilih atau golput? Banyak variabel penyebab golput, diantara variabel yang menyebabkan golput itu pasti ada golput yang merupakan bentuk dari partisipasi politik. Kita tahu bahwa di universitas pasti ada OMEK (organisasi mahasiswa ekstra kampus) yang memiliki ideologi golongan tetapi juga ada yang netral. Disini kita tahu bahwa perebutan posisi presiden EM pasti tempat dimana “OMEK” akan berkuasa juga dan setiap kebijakannya akan sesuai dengan ideologi yang mereka terapkan. Ketika pemilihan di mulai golput adalah bentuk suatu pengungkapan rasa tidak setuju dengan calonnya. Kita katakan saja calon satu adalah dari HMI dan calon dua adalah dari KAMMI.Kami adalah sekelompok orang yang golput pasti kami punya alasan mengapa kami golput. Karena kami tahu baik buruknya dari kedua OMEK tersebut, dari kebijakannya mungkin lebih menonjolkan suatu golongan sehingga golongan yang netral atau golongan lain sulit untuk masuk ke ranah politik universitas tersebut. Golput ditunjukan untuk menolak kebijakan tersebut dan demikian bisa dikatakan dalam partisipasi politik secara tidak langung.

Kami akan menyimpulkan bagaimana golput itu. Termasuk partisipasi politik kah atau tidak. Jika menurut kami golput mempunyai banyak variabel diantaranya, kita tidak tau siapa calonya, kurangnya sosialisasi, tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT,  tidak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan, tidak percaya pada mekanisme demokrasi, ada yang memang apatis, ada juga yang memilih golput untuk menentang sistem pemerintahan yang sudah ada seperti kediktatoran. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa golput dapat masuk ke partisipasi politik jika kita mempunyai tujuan tertentu untuk melawan atau mengubah sistem. Tetapi golput tidak bisa di katakan partisipasi politik jika kita memang hanya beralasan tidak tahu calonya atau memang apatis untuk tidak memilih.

**BAB IV**

**PENUTUP**

**4.1. Kesimpulan**

a. Partisipasi politik dapat berupa partisipasi individu maupun kelompok. Partisipasi politik yang paling terlihat di Indonesai adalah persaingan untuk menjadi pemimpin sebuah organisasi maupun negara. Namun, *money politics* dan segala macam hal yang berbau kecurangan masih selalu mengiringi perkembangan partisipasi politik di Indonesia.

d. Golput dapat masuk ke partisipasi politik jika kita mempunyai tujuan tertentu untuk melawan atau mengubah sistem. Tetapi tidak bisa di katakan partisipasi politik jika kita memang hanya beralasan tidak tau calonya atau memang apatis untuk tidak memilih.

**4.2. Saran**

a. Dalam berpartispasi politik sebaiknya jangan hanya memberikan kritik dan melakukan demonstrasi, namun kita juga harus memberikan konstribusi dan membantu pemecahan masalah yang ada di lingkungan masyarakat.

b. Sebaiknya masyarakat Indonesia lebih meningkatkan partisipasi politiknya di Indonesia, karena demi berkembangnya perpolitikan di Indonesia.

e. Sebagai warga negara yang baik seharusnya kita tidak apatis dalam berpartisipasi politik dan menghindari melakukan golput.